

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal utama penghasilan Indonesia ialah pajak. Hal penghasilan negara serta keadaan keuangan negara bukan hanya dari sektor minyak dan gas tetap juga dipengaruhi oleh pajak yang pada dasarnya ingin dijadikan komponen penting penerimaan negara dan mulai dilakukan beberapa waktu belakangan ini. Tumpuan penting pengumpulan pajak sebenarnya adalah bentuk dedikasi, tanggung jawab atau keharusan dan kepedulian rakyat, ini berguna untuk mendukung pembangunan skala nasional serta pembiayaan pengeluaran negara dalam hal ini diharapkan sebagai WP untuk membayar pajak dengan rutin dan tepat waktu. Sehingga penerimaan pajak menjadi unsur penting yang diharapkan pemerintah karena memiliki potensi besar bagi penerimaan negara (Arahman, 2012).

Pajak digunakan secara langsung untuk pembiayaan negara dalam skala umum yang dimana pajak berdasarkan undang-undang merupakan iuran seluruh rakyat Indonesia kepada keuangan negara dan tidak adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) (Arahman, 2012). Dari hasil pengertian di atas pajak bisa diartikan bahwa pajak juga digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia dengan membangun fasilitas umum dan bukan hanya dimanfaatkan mendanai tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah. Serta pajak juga bisa dikatakan pajak adalah iuran yang sifatnya memaksa. Oleh karena itu bagi masyarakat pajak salah satu beban yang berkelanjutan sehingga dihindari oleh masyarakat walaupun pajak juga digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional yang bisa dirasakan

masyarakat secara langsung serta untuk kemajuan bangsa dan pemasukan kas negara.

Direktorat Jendral Pajak berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dengan melakukan berbagai strategi salah satunya reformasi perpajakan yang sebelumnya pembayaran pajak dari *official assessment system* ke system pembayaran *self assessment system* sebab pajak sangat penting bagi pemasukan kas negara. Dalam hal ini yang berkaitan dengan perhitungan, pembayaran serta pelaporan besarnya pajak yang akan dibayarkan sepenuhnya merupakan wewenang wajib pajak. System akan berjalan dengan baik apabila aparat melakukan pengawasan secara maksimal dan wajib pajak memiliki kesadaran taat terhadap aturan yang berlaku serta rutin membayarkan pajak tepat waktu ini sangat membantu memaksimalkan penerimaan pajak.

“Movere” asal kata motivasi artinya “anjuran atau pelopor” ialah unsur penting yang bisa memberikan pengaruh akan meningkatkan kesadaran wajib pajak mematuhi aturan pembayaran pajak. Aparat selalu melaksanakan sosialisasi arti penting nya pajak bagi kemakmuran rakyat dengan meberikan motivasi kepatuhan wajib pajak(Ginting & Pontoh, 2017:1999). Hal ini didukung penelitian (Putri, 2016:4) motivasi adalah salah satu unsur menjalankan kegiatan dalam hal ini yaitu motivasi pembayaran untuk mencapai tujuan perpajakan.

Komponen lain WP untuk membayar pajak ialah Pendidikan. Ini dikarenakan mempengaruhi pola pikir dan juga tingkah laku apabila Pendidikan seseorang semakin tinggi. Berbanding lurus Siahaan (Kakunsi et al., 2017), yaitu pemerintah akan dengan mudah memotivasi masyarakat bahwa segala sesuatu

yang kita peroleh harus mengorbankan sesuatu dan harus dibayarkan kemudahan dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang tinggi.

Hal penting lainnya adalah yang berkaitan dengan penerimaan pajak yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri karena di Indonesia kesadaran pajak masih sangat rendah ini dibuktikan dengan kurangnya masyarakat yang mendaftarkan diri mengurus NPWP secara sukarela padahal ini sudah diatur dalam undang-undang NPWP wajib dimiliki orang yang berpenghasilan di atas PTKP. Padahal karyawan banyak berpenghasilan di atas PTKP tetapi di laporan SPT Tahunan PPh pasal 21 karyawan tersebut tak punya NPWP. Menurut (Rahman, 2018:4) Jika WP punya pengetahuan bagus terkait pajak secara otomatis kesadaran wajib pajak tinggi.

Motivasi, tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak ialah unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Supaya target pajak tercapai maka Pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat.

Objek penelitian ini didapatkan di KPP Pratama Batam Selatan, 42.000 WP tercatat dan melaporkan SPT tahunan Pajak penghasilan (PPh) sampai 30 April 2017 dan pelapor terbanyak sebanyak 37.084 wajib pajak orang pribadi. Ini menandakan jika WP tidak seluruhnya taat bayar pajak sesuai ketentuan peraturan. Harta riil tidak dilaporkan serta tidak datang ke kantor pajak merupakan contoh motif wajib pajak untuk tidak memenuhi laporan pajak mereka. Pajak yang tinggi masyarakat tidak membayar pajak namun jika pajak rendah dana untuk pembangunan tidak ada hal ini dalam membebaskan pajak pada rakyat tidak

gampang. Tidakkah gampang melimpahkan pajak Kepada Rakyat. Pajak yang besar akan membuat masyarakat tak bayar. Tingkat penerimaan dan pelorang SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi terlihat dari tingkat kepatuhan pajak.

Berikut ini data kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

Tabel 1.1 Data Kepatuhan KPP Pratama Batam

Tahun	Jumlah WP Aktif	Jumlah WP Yang Melapor SPT	Pencapaian
2015	222.343	40.941	18%
2016	257.788	71.924	28%
2017	268.982	63.449	24%
2018	283.327	69.529	25%
2019	295.043	61.141	21%

8Sumber : (Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, 2020)

Kesimpulan tabel 1.1 ialah tahun 2015-2019 tidak semua orang membayarkan pajak masih banyak WP aktif tidak taat bayar pajak padahal ini berpengaruh terhadap pendapatan negara apabila pendapatan negara tinggi maka pembangunan akan semakin banyak dilakukan. Namun dari data diatas tidak semua wajib pajak aktif melaporkan SPT dan bayar pajak PPh setiap tahun nya sehingga pendapatan negara menurun dari sektor pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk memberikan gambaran bagi DJP bagaimana pengaruh motivasi, tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Suatu system bisa pertimbangan sukses jika pemakai puas (DeLone dan McLean, 2003).

Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari kesadaran mencatatkan diri, menyampaikan SPT, membayar serta menghitung pajak terhutang. Segala sesuatu

memiliki dampak bagi keadaan yang ada termasuk perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dari segi perpajakan apakah berdampak buruk maupun baik .

Menurut (Assa et al., 2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa motivasi, tingkat pendidikan dan sosialisasi secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Kemauan WP Mengikuti Pengampunan Pajak. Sedangkan menurut (Kakunsi et al., 2017) Data dianalisis menggunakan ANOVA dan hasilnya menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi. Dengan tingkat pendidikan itu berdampak pada kepatuhan pribadi wajib. Apakah Gender dan Pendidikan tidak memiliki hubungan dalam mempengaruhi. Pentingnya tingkat pendidikan dalam implementasinya dapat ditindaklanjuti oleh DJP melalui sosialisasi yang sedang berlangsung, konseling pajak, seminar perpajakan dan pelatihan, dll.

Dari materi latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, kemudian peneliti menentukan judul “Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah beberapa identifikasi masalah berlandaskan latar belakang dalam penelitian ini, yaitu :

1. Selama 3 tahun belakangan ini terjadi penurunan pada tingkat kepatuhan KPP Pratama Batam
2. Wajib Pajak yang tidak patuh karena tidak adanya motivasi dalam membayar pajak.

3. Semakin rendah pengetahuan atau tingkat pendidikan masyarakat Kota Batam, pemerintah akan kesulitan menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
4. Tingkat kesadaran tentang pajak di Kota Batam masih sangat rendah. Fakta membuktikan, banyak karyawan masih belum memiliki NPWP, sedangkan yang sudah mempunyai juga enggan untuk membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih fokus terhadap pokok permasalahan yang dalam penelitian ini sehingga penulis membuat Batasan masalah sehingga pembahasan masalahnya lebih terarah. Batasan masalah yaitu :

1. pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
2. pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
3. pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimana pengaruh motivasi, tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Melihat pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Melihat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
3. Melihat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
4. Melihat pengaruh motivasi, tingkat pendidikan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa kita ambil dalam penelitian ini yaitu :

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Hasil penelitian dijadikan materi untuk perbandingan aspek kinerja setiap tahunnya bagi kantor pelayanan pajak pratama kota batam.
2. Bisa dijadikan untuk bahan perbandingan dengan system yang ada setiap tahun agar dapat melakukan perbaikan dan melakukan perubahan pada system yang ada selama ini terutama dalam ilmu dan pendidikan perpajakan.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Sebagai bahan meningkatkan ilmu bagi peneliti kedepan atau bagi masyarakat umum.
2. Bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta menambah motivasi untuk penelitian selanjutnya.